

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*) dalam bentuk kredit dan atau memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit social.¹ Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang.²

Berbagai kemudahan transaksi keuangan dapat diperoleh dari bank, seperti penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit yang akan membantu meningkatkan skala usaha. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pendapat masyarakat. Di samping itu, bank juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyimpanan dana seperti giro, tabungan, deposito untuk memberikan kemudahan dalam hal ketertiban dan keamanan menghindari kebekuan harta kekayaan dan kemacetan dalam mengembangkan modal.

¹ Artikel Muchlisin Riadi, "Pengertian dan Fungsi perbankan" Diakses melalui www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dgsian-fungsi-perbankan.html?m=1 pada tanggal 15 Juni 2017

² Veithzal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm

Bank syariah sama halnya dengan bank konvensional berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institutions*). Bedanya bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*) juga terbebas dari *maysir*, *gharar*, *risywah*, dan *batil*. Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti kiriman uang, pembukuan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.³

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵

UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam ketentuan umum point 25 disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

³ Sultan Reny, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1

⁴ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁶

Bank BRI Syariah memiliki produk pembiayaan mikro yang memakai skema *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh penjual (Bank) dan pembeli (Nasabah), dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli bank + *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Produk pembiayaan mikro yang dapat dibuka bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk modal pengembangan usaha. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan mikro BRI Syariah hanya untuk Warga Negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun. Dan telah memiliki usaha tetap setidaknya telah berjalan selama 2 tahun. Tujuan dari pembiayaan ini digunakan sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi. Tersedia dengan 3 jenis plafond pinjaman, diantaranya yaitu Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan Mikro 500iB dengan hitungan tenor maksimal 60 bulan.

Para pihak mengadakan akad (perjanjian) *murabahah* bahwa pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur dengan waktu yang sudah ditentukan. Apabila pembayaran angsuran telah melebihi jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan denda perhitungannya adalah *margin efektif* / (dibagi) 360 x (dikali) Total angsuran perbulan/ (dibagi) 100 x (dikali) 1 hari.

⁶UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Berikut klausul akad Pasal 3 Jangka Waktu, Pembayaran, dan Denda point 4 disebutkan bahwa atas keterlambatan kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, maka Bank akan mengenakan denda terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya dan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial.

Menurut Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁷

Point 6 (enam) dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa dana *ta'zir* diperuntukkan sebagai dana sosial, tetapi pada aplikasinya bahwa di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo tidak demikian denda *ta'zir* yang didapatkan dikembalikan lagi ke rekening nasabah.⁸

Sebagai contoh, seorang nasabah mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Kopo suatu saat nasabah tersebut tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya kemudian pihak bank melakukan tindakan dengan cara menelponnya mengingatkan bahwa nasabah tersebut berada dalam jatuh tempo pihak bank memberikan tenggang waktu 2-3 hari untuk membayarnya apabila nasabah tidak menepati janjinya dan tidak memberikan bukti dalam keadaan *force majeure*, tindakan selanjutnya pihak bank mendatangi rumah nasabah dengan

⁷Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran

⁸Wawancara dengan Bapak Ovan Manthovanipada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.

membawa surat peringatan dimana dalam surat tersebut terdapat tagihan beserta besaran denda yang harus segera dibayar. Besaran denda terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya, setelah nasabah membayar tagihan beserta dendanya pihak bank akan mengembalikan lagi besaran denda ke rekening nasabah dengan mengakumulasi besaran denda di akhir pembiayaan.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwasannya dalam akad telah disebutkan mengenai denda "bank akan mengenakan denda kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi dan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial", tetapi pada kenyataannya dana denda yang diperoleh tidak diperuntukkan sebagai dana sosial tetapi dikembalikan lagi melalui rekening nasabah. Untuk memudahkan penelitian dibuatlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian Pembiayaan Mikro kepada nasabah di BRISyariah KCP Kopo?
2. Bagaimana penerapan denda *ta'zir* pada produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo?
3. Bagaimana kesesuaian antara Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dengan penerapandenda *ta'zir* pada produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo?

⁹Wawancara dengan Bapak Ovan Manthovanipada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemberian Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Kopo.
2. Untuk mengetahui penerapan denda *ta'zir* pada produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dengan denda *ta'zir* pada produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini digunakan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama diperkuliahan dalam melakukan pembiayaan dan menerapkan denda *ta'zir* yang sesuai dengan Syariah.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis terutama terhadap penerapan denda *ta'zir* yang sesuai dengan syariah.

- c. Bagi Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain yang sejenis atau berkaitan dengan isi dari penelitian.

E. Studi Terdahulu

Pada tahun 2014 telah dilakukan penelitian oleh Muchtar Adiwijaya yang membahas tentang “APLIKASI DENDA PADA PRODUK iB HASANAH CARD DI BNI SYARIAH CABANG BANDUNG” dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa nasabah yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan

denda, tetapi denda pada kartu kredit tidak disebutkan dalam akad sehingga adanya ketidakjelasan antara kedua belah pihak.¹⁰ Persamaan masalah yang terjadi membahas mengenai denda dan perbedaannya pada penelitian ini membahas denda yang tidak dicantumkan dalam akad.

Pada tahun 2014 telah dilakukan penelitian oleh Rika Kurniati yang membahas tentang “PENETAPAN TA’WIDH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CIMAHI” dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa menurut Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan khusus menjelaskan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, dalam implementasinya dilapangan pihak bank mencantumkan ganti rugi dalam akad kepada nasabah bila terlambat mengangsur cicilannya sebesar Rp 2000.- perhari.¹¹ Persamaan yang terjadi pada nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran dan perbedaannya denda yang digunakan menggunakan prinsip *ta’widh*.

Kemudian pada tahun 2010 telah dilakukan penelitian oleh Moch. Hasyim Sumantri yang membahas tentang “PELAKSANAAN DENDA DALAM IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DI BPR ISHLAHUL UMMAH CILEMBER CMAHI” dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa dalam akad telah disebutkan adanya sanksi apabila terjadi keterlambatan. Pihak BPRS Ishlahul Ummah memberikan denda sebesar 3% dari jumlah angsuran apabila diakumulasikan selama setengah bulan denda yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebesar

¹⁰Muchtar Adiwijaya, Aplikasi Denda Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung, Program Studi Muamalah UIN SGD Bandung, 2014.

¹¹Rika Kurniati, Penetapan Ta’widh Pada Produk Pembiayaan Murabahah Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi, Program Studi Muamalah, UIN SGD Bandung, 2014.

45% hal ini bank memberikan denda terlalu besar terhadap nasabah.¹² Persamaan nya membahas mengenai denda dan perbedaannya dalam penelitian Moch Hasyim lebih menitikberatkan kepada riba.

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian *muamalah* terbagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, *muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian *muamalah* dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹³

Bermuamalah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:

- a. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
- b. Adanya barang (*maal*) atau jasa (*amal*) yang menjadi obyek transaksi.
- c. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijab*) bersama dengan kesepakatan menerima (*kabul*).

Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Syarat-syarat sah dalam bermuamalah antara lain:¹⁴

¹²Moch. Hasyim Sumantri, Pelaksanaan Denda Dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Di Bpr Ishlahul Ummah Cilember Cmah, Program Studi Muamalah, UIN SGD Bandung, 2010.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1-3

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-75

- a. Benda-benda atau barang yang diperjualbelikan milik sendiri, dapat diserahkan, memberi manfaat, jelas barangnya, tidak dibatasi waktunya.
- b. Orang yang melakukan akad beragama Islam dan *Baligh*.
- c. Syarat sah *ijab Kabul*, jangan ada yang memisahkan, dan tidak diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab dan kabul*

Islam berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai *materialisme* dan *spiritualisme*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsisten terhadap nilai-nilai humanisme. Adapun dalam prinsip hukum fiqh *muamalah* dalam UU No.21 tahun 2008:¹⁵

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan inti ajaran Islam, sedangkan inti ajaran tauhid adalah *monotheis* yaitu ajaran tentang hakekat ke-Esaan Allah SWT, dalam segala zat, sifat dan perbuatan. Tauhid merupakan prinsip hukum Islam di samping keadilan. Artinya, hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakkan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar, membantu yang teraniaya, menolong fakir miskin, dan senantiasa melakukan *al-amr ma-ruf nahy an al-mungkar*.

2. Prinsip Keadilan

Salah satu dasar pertimbangan penetapan UU No.21 Tahun 2008 prinsip ini untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia guna tercapainya

¹⁵Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 146-155

masyarakat adil dan makmur. Tujuan nasional dalam ranah ekonomi dikembangkan melalui system ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai prinsip syariah.

3. Prinsip *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar*

Amr Ma'ruf Nahy Mungkar adalah salah satu dari prinsip-prinsip hukum islam. Hukum islam yang memiliki prinsip *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar* adalah sumber pengambilan bahan baku UU No.21 tahun 2008. Oleh karena itu, materi UU ini disipati oleh dan meliputi norma ma'ruf dan munkar. Norma *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar* diterjemahkan oleh UU dalam bentuk keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Tujuannya sama yaitu teraihnya keberuntungan, keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Setelah mengenal prinsip-prinsip dalam fiqh *muamalah*, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu *Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil*.¹⁶

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian islam ataupun fiqh muamalah, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

a. *Asas Al-Huriyah* (kebebasan)

¹⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2002), hlm 4

¹⁷ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm.46

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

b. *Asas Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

c. *Asas Al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

d. *Asas Al-Ridho* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak

e. *Asas Ash-Shidiq* (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal yang dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits..

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan

dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dimana hal ini tidak dijamin oleh system konvensional.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat menjadi tiga bagian yaitu:¹⁸

1. Produk penyaluran dana
2. Produk penghimpunan dana
3. Produk jasa

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹⁹ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Murabahah sebagai akad transaksi *muamalah* dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah produk pembiayaan perbankan syariah

¹⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hlm 97.

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 160

untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan penggunaan akad *murabahah* dan *wakalah* didalamnya.²⁰

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah diharuskan tunduk dan sesuai dengan aturan dari fatwa DSN sebagai acuan utama dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satu sistem yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Diantara yang diatur oleh DSN-MUI dalam hal pembiayaan adalah masalah akad dan pembiayaan tersebut. Akad yaitu sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu dan sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik.²¹

Nasabah yang melakukan pembiayaan contohnya pembiayaan yang menggunakan skema *murabahah* dengan melakukan kelalaian atau *wanprestasi* yakni pada nasabah yang menunda-nunda pembayaran utang atau tagihan setelah adanya jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi berupa denda *financial* berupa uang, baik denda menggunakan denda *ta'zir* ataupun dengan denda *ta'widh*. Denda *ta'zir* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan *ta'widh* diatur dalam Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Yang mana tujuan dari pemberlakuan denda ini dilakukan untuk membuat nasabah efek jera agar nasabah tidak mengulangi perbuatannya kembali.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode deskriptif-analisis dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai Penerapan Denda

²⁰Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, *Standard Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hlm.16.

²¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm 65.

ta'zir pada Produk Pembiayaan Mikro Di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Kopo Bandung. Yang kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan sekunder. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.²²

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel dan dapat pula berasal dari lapangan. Yaitu hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini, yaitu marketing dan SPV BRI Syariah KCP Kopo.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal, Undang-Undang, serta situs di internet yang berkaitan dengan

²².Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 114

penelitian yang dilakukan. Dan beberapa informasi lain yang berisikan tentang denda.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah Suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³
- b. Studi pustaka, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

4. Analisis Data

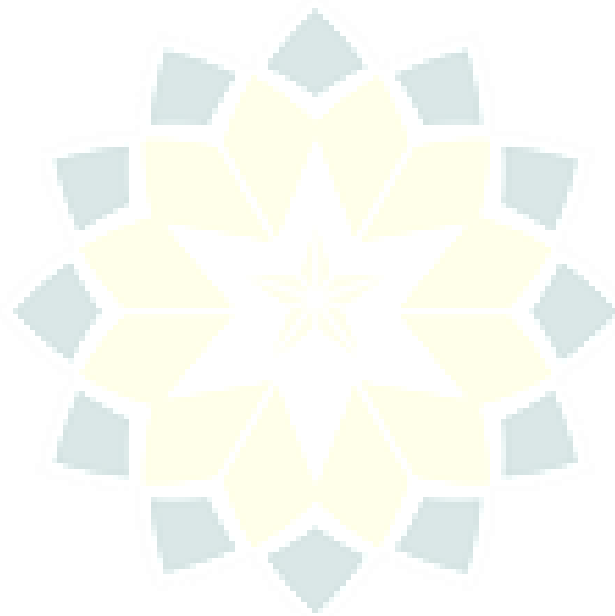
Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencairan, hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat di media massa, terutama surat kabar.

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo dan sumber data lain sehingga penulis mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan berikut:

²³Heri Gunawan, *Dasar-dasar metodologi penelitian pendidikan*, (fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017), hlm.65

- a. Memahami sumber data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara dua data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kemudian menghubungkan dengan teori, dan
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG